

**PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS PASAR
DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Studi Peran Pesantren Salafiyah dan Modern
di Indonesia

Muhammad Isnaini

*Ketua Asosiasi Peneliti Sosial Keagamaan Indonesia (APSKI), dan Dosen
Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.*

Abstrak

Ada empat macam kemungkinan pola usaha pemberdayaan ekonomi dilingkungan pesantren, sebagai tawaran terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia pada saat ini: usaha ekonomi yang berpusat pada kiyai, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan usaha ekonomi bagi para alumni santri. Sedangkan Eksistensi pesantren sebagai agent perubahan sosial ada beberapa paradigma yang harus ada, yaitu paradigma kapitalistik, kritis dan posmodernisme, karena itu pesantren salafi cenderung mengambil jarak dengan pemerintah, sedangkan pesantren kombinasi (modern) mencoba menanggapi ajakan pemerintah. Beberapa komponen pesantren model yang berbasis pemberdayaan ekonomi, pertama, pesantren harus menyesuaikan dirinya dengan kenyataan bahwa sistem sekolah modern (hubungan antara kyai dengan santri mengembangkan suatu sistem nilai yang baru dalam lingkungannya sendiri), kedua, pesantren berusaha merencanakan pembiayaan kegiatan-kegiatannya secara mandiri, ketiga, pesantren menemukan cara pemecahan dilema besar kehidupannya, keempat, pesantren memahami implikasi struktural dari peran serta rakyat dalam pengembangan masyarakat dan bagaimana pesantren menanggapi peranannya dalam proses tersebut, kelima, pesantren merencanakan untuk membina sifat-sifat khas budaya maupun kedudukan sosio kulturalnya.

Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga yang mampu melahirkan jutaan ulama dan kiyai, yang akan meneruskan perjuangan untuk mengeluarkan masyarakat dari kebodohan, dengan niat baik dan ikhlas karena Allah SWT. Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier (1981: 38), bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itulah muncul para tokoh masyarakat atau kiyai kharismatik yang dipandang memiliki banyak kelebihan, kewibawaan dan berkah, yang lahir dari lembaga pendidikan tersebut, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Wahid Hasyim dan lain-lain.

Pesantren merupakan sebuah lembaga keagamaan yang diakui mempunyai peran penting dalam proses pendidikan masyarakat. Pesantren juga telah terbukti mempunyai peran-peran yang

signifikan dalam proses perubahan sosial di Indonesia, khususnya di bidang pengembangan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik dalam bermasyarakat berbangsa. Meminjam istilah Taufik Abdullah (1997:155), yang mengatakan bahwa eksistensi pesantren selama ini berada diantara dua sistem dominan yaitu sistem birokrasi (baca: negara) dan sistem pasar (kapitalisme). Kedepan, mampukah pesantren meningkatkan perannya selain sebagai tempat melahirkan para calon ulama juga dapat mengembangkan bangunan tata moral masyarakat yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang diantara dominasi otonomi daerah yang jargonnya memberikan peluang sebesar-besarnya kepada prakarsa unsur-unsur lokal, nampak menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, tidak terkecuali dalam kasus pesantren.

Peran pesantren dalam keterlibatannya memajukan masyarakat atau dalam pembangunan bangsa, paling tidak ada tiga permasalahan besar yang perlu dijawab: *pertama*, seperti diketahui pesantren merupakan satu sistem

pendidikan dan kultural yang dulunya pernah cenderung isolatif, yakni mengambil jarak dengan sistem birokrasi negara dan sistem pasar, dan hanya berorientasi sebagai lembaga pencipta calon ulama dan kurang mengembangkan kurikulum di luar konsep ulama, mengingat tidak semua santri pada akhirnya jadi ulama. *kedua*, dalam semakin hegemoninya sistem pasar (kapitalisme global), eskalasi peran pesantren mengalami penurunan. Akibatnya pesantren mengalami dalam beberapa hal disfungsi sosial atau pesantren belum bisa menjadi lembaga yang mampu mengimbangi perkembangan zaman. Mampukah pesantren meningkatkan kembali perannya sebagai pusat pengembangan masyarakat?; *ketiga*, apakah pesantren mampu turut bermain dalam sistem mekanisme pasar dengan bergerak di bidang ekonomi, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan dan pusat transformasi keagamaan.

Mengambil dasar asumsi yang sama, mengingat semua agama mengajarkan nilai-nilai positif berkehidupan, maka menurut kami di

Islampun mempunyai peluang yang hampir mirip sama. Bahwa agama bisa menjadi faktor pendorong yang berpengaruh dalam menumbuhkan semangat berusaha, semangat berekonomi. Banyak contoh komunitas beragama di Indonesia dapat ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan agama membangkitkan semangat *enterpreuner* di daerah-daerah tertentu, seperti komunitas muslim Pekalongan dengan industri batik, masyarakat Jatinom Klaten dengan industri baja, masyarakat Kota Gede Yogyakarta dengan industri kerajinan perak. Bagaimana kepemimpinan pesantren membentuk lembaga keulamaan dan pusat pengembangan ekonomi santri, bagaimana eksistensi kepemimpinan pesantren terhadap perubahan sosial dan peluangnya di era otonomi daerah, dan bagaimana format pesantren model yang berbasis pemberdayaan ekonomi santri. Pengumpulan data dalam penulisan ini ditempuh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam bahasan ini akan dicari dua model pengembangan

ekonomi dalam dua model pesantren yang berbeda kemudian diperbandingkan antara keduanya.

Pesantren Lembaga Keulamaan dan Pusat Pengembangan Ekonomi

Nampak ada dua paradigma dominan yang menghinggap pandangan kalangan keluarga pesantren. *Pertama*, adalah paradigma pesantren sebagai lembaga keulamaan. *Kedua*, paradigma pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Oleh karena itu usaha-usaha pendekatan untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat mulai saat itu diidentifikasi terdapat tiga pendekatan utama: (1) pendekatan pembaharuan pengajaran oleh beberapa pesantren yang berkembang secara tidak teratur dan tanpa koordinasi dan hanya dikenal dan diikuti secara terbatas. Usaha ini dilakukan oleh para kiyai pesantren itu sendiri, dan kebanyakan kiyai yang telah bersentuhan dengan pendidikan modern; (2) pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya

Departemen Agama melalui paket-paket program bantuan; (3) pendekatan yang berasal dari prakarsa organisasi swasta yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan kerja sama yang erat dengan pesantren progresif tertentu. Seperti usaha yang dilakukan LP3ES diikuti P3M yang melakukan usaha pendampingan bagi pesantren-pesantren tertentu dalam rangka mengembangkan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat.

Kebijakan pembangunan nasional saat ini yang menerapkan konsep otonomi daerah, di mana prakarsa dari bawah (baca: masyarakat) diberi keleluasaan atau bahkan dikembangkan dalam bentuk kerja sama yang lebih mantap antara pemerintah dan unsur-unsur atau institusi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan daerah. Bagi kalangan pesantren misalnya di daerah Sumatera belum begitu terasa. Namun bukan berarti tidak ada program pemerintah daerah untuk pengembangan pesantren.

Klaim pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat ini,

menurut kami, tidaklah suatu bentuk sikap yang latah dan mengada-ada. Alasannya partisipasi pesantren selama ini terbukti mempunyai peran yang cukup menyejarah dalam dunia pendidikan, mempunyai elastisitas yang tinggi sehingga pesantren dapat *survive* dalam berbagai bentuk masyarakat, dan pesantren mempunyai peran yang vital dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi santri, ke depan output pesantren, kalau boleh membuat pemetaan, perlulah kiranya pesantren dipetakan dalam kategori-kategori yang lebih tegas, sejauh mana pesantren menargetkan output santri dari pendidikan dilembaganya. Dalam tulisan ini penulis membuat beberapa macam tipe umum karakter pesantren dilihat dari target output yang dimiliki.

Skema Target Output Santri dari Pesantren

Tipe Pesantren	Target Output Santri		
	Berkepribadian Soleh & Faham Ajaran-ajaran dasar agama	Mampu Membaca Kitab Kuning & Menguasai Kitab-kitab klasik	Mempunyai ketrampilan Praktis tertentu (Mis. Trampil bahasa asing, Pertanian, pertukangan, elektronik, otomotif dsb)
A	√	√	√
B	√	√	
C	√		√
D	√		

Dengan pengkategorian semacam ini, akan mudah bagi pesantren untuk melihat *grade output*

santri yang dihasilkan. Akan mudah juga bagi santri untuk memetakan dirinya, sejauh mana dia

telah berhasil menjadi santri dengan beberapa keahlian yang dimilikinya. Dari sini kita bisa memandang penting perlunya pesantren melakukan diversifikasi keilmuan dan atau diversifikasi keahlian praktis dalam mengembangkan keunggulan pesantren yang nantinya menjadi ciri khas keahlian pada output santrinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, respon pesantren dalam menghadapi keterlibatan pemerintah dalam pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren, diantara jenis-jenis pesantren yang ada, yaitu salafi, kombinasi dan khalaf), masing-masing terdapat perbedaan. (1) Pesantren salafi cenderung mengambil jarak dengan pemerintah dengan segala program yang ditawarkan, sikap demikian nampak juga dalam kegiatan ekonomi, pesantren salaf nampak menghindari usaha-usaha ekonomi yang diprogramkan pemerintah. Praktik ekonomi yang terjadi di pesantren salaf cenderung mengalir apa adanya, yaitu santri bergaul dengan masyarakat dan pada suatu saat dimintai tolong pekerjaan yang nantinya dikasih upah; (2) Pesantren

kombinasi mencoba menanggapi ajakan kerjasama dari pemerintah. Namun karena usaha ekonomi lebih banyak lahir karena merespon ajakan pemerintah, maka usaha ekonomi yang dijalankan terkesan tertatih-tatih dan belum dikatakan berhasil; (3) Pesantren khalaf atau modern dalam mensikapi ajakan kerjasama dari pemerintah nampak *welcome* atau menerima.

Hal ini karena memang usaha ekonomi di pesantren modern memang sengaja diprogramkan, sehingga apapun yang ditawarkan akan diterima dengan baik. Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren. *Pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kiyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. *Kedua*, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. *Ketiga*, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. *Keempat*, usaha

ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi alumni.

Pesantren dan Perubahan Sosial

Ada beberapa konsep atau paradigma perubahan sosial yang berkembang belakangan ini. Mansour Fakhri dalam bukunya *Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi* (2001) menyebutkan adanya tiga paradigma besar dalam perubahan sosial, yaitu paradigma kapitalistik, paradigma kritis dan paradigma postmodernisme.

Pertama, paradigma kapitalistik, pandangan ini kalau dicari sumber ajarannya berasal dari pandangan ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith yang dituangkan dalam karyanya *Wealth of Nation* (1776). Adam Smith mengembangkan teori pentingnya 'akumulasi kapital' dalam pengembangan ekonomi. Teorinya tentang *labour theory of value*, di mana buruh dianggap sebagai sumber kekayaan bangsa,

selanjutnya menjadi dasar kapitalisme. Paradigma kapitalisme ini selanjutnya menjadi landasan munculnya teori-teori seperti: teori evolusi, teori fungsionalisme, teori modernisme, teori pertumbuhan ekonomi Rostow dan masih banyak lagi. Teori kapitalistik ini kemudian mendapat kritik keras dari Karl Marx yang selanjutnya menjadi dasar lahirnya paradigma kritis.

Kedua, paradigma kritis sebagaimana dikemukakan di atas diilhami analisis marxisme. Teori ini awalnya dimulai dari teorinya Karl Marx dalam buku *The Capital* yang kemudian dikembangkan oleh teori-teori yang mengikutinya atau bahkan teori yang mengkritisinya. Teori-teori kritis (*critical theories*) pada dasarnya adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis sangat berpengaruh terhadap teori perubahan sosial aliran kritik. Selanjutnya teori kritik tidak sekedar teori yang melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem kapitalisme, melainkan teori untuk merubah sistem dan struktur tersebut.

Ketiga, paradigma posmodernisme adalah berbagai teori yang tergolong teori kritis yang tidak bisa atau tidak bisa dimasukkan dalam katehori kapitalistik dan paradigma kritis. Teori-teori yang dapat diterapkan pada pola pmikiran atau gerakan paradigma alternatif diantaranya adalah (1) teori dari paradigma gerakan feminisme; (2) teori-teori yang merujuk pada teologi pembebasan; (3) berbagai teori yang mendapatkan pengaruhnya dari pendekatan postmodernisme.

Dari berbagai paradigma perubahan sosial tersebut, pesantren tentu saja tidak kemudian perlu mendukung mati-matian terhadap satu di antara paradigma-paradigma yang ada. Bisa jadi kalangan pesantren memerlukan pengayaan wacana dengan keragaman paradigma tersebut. Artinya keluarga pesantren hendaknya mulai dikembangkan kesadaran berwacana dalam diskursus pemikiran tentang perubahan sosial. Agar secara cermat para santri dapat berpolemik, bahkan dapat pula berpartisipasi dalam tema penguatan-penguatan

aspek-aspek perubahan sosial kemasyarakatan.

Berkaitan dengan keterlibatan pesantren di bidang ekonomi, sesuai dengan tema Penulisan ini yang mengangkat permasalahan pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren, perlu kita mengetahui beberapa faktor umum yang mendasari proses pembangunan ekonomi. Faktor-faktor itu adalah:

Pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berarti lebih banyak tenaga kerja tetapi juga lebih banyak mulut yang harus diberi makan; pengaruhnya atas pembangunan ekonomi akan tergantung pada hal-hal seperti pola pertambahan penduduk, perluasan pasaran yang diakibatkan, dan tekanan yang ditimbulkan atas sumber-sumber daya alam yang langka dan persediaan modal. Jika penambahan jumlah penduduk terjadi dalam lingkungan yang sumber daya alam maupun modalnya terbatas, maka pembalikan hasil tambah yang semakin menurun sangat mungkin menjadi masalah yang pelik.

Sumber-sumber daya alam.
Sumber daya alam tidak dapat dianggap sebagai suatu pembahasan yang mati atas pembangunan ekonomi; sumber-sumber daya dapat 'terpakai habis' , sumber-sumber daya alam baru dapat ditemukan atau diperoleh, dan akhirnya sumber-daya yang lain dapat dimanfaatkan sejalan dengan kemajuan teknologi.

Pemupukan modal.
Pemupukan modal memudahkan diperkenalkannya teknologi baru, menyediakan sarana-sarana bagi jumlah penduduk yang semakin bertambah, dan menjadi penyebab digunakannya proses-proses 'jalan memutar' yang produktif; biaya pengumpulan modal adalah hasil keluarannya yang sebenarnya dapat kita habiskan hari ini tetapi yang dalam kenyataannya kita tanamkan demi hasil keluaran yang lebih banyak pada esok hari.

Skala, spesialisasi, pembagian kerja. Dengan diperkenalkannya unit-unit produksi berskala lebih besar dengan spesialisasi serta 'pembagian kerja' yang semakin meningkat , sebuah masyarakat akan mendapatkan hasil kerja yang lebih

banyak dari sejumlah faktor produksi tertentu yang dimilikinya; kemungkinan untuk memanfaatkan cara-cara sedemikian itu sangat dipengaruhi oleh 'luasnya pasaran'.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Cara yang lain untuk meningkatkan hasil keluaran per unit masukan faktor adalah melalui peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya. Ini dapat berupa *efisiensi alokasi* yang lebih tinggi ataupun *efisiensi X* yang lebih besar; di mana yang disebutkan belakangan adalah menyangkut mutu serta usaha yang berkaitan dengan jasa-jasa tenaga kerja dan pengaturan.

Kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi membawakan perubahan-perubahan yang mendasar dalam teknik-teknik produksi dan produk-produk yang baru; kemajuan teknologi tergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan, pada tingkat-tingkat pendidikan dalam masyarakat, dan dalam hubungan dengan pembaruan-pembaruan praktis pada jiwa kewiraswastaan yang kuat dalam masyarakat.(Gill: 1983:45-46).

Beberapa faktor tersebut perlu dicermati untuk bagi para pemerhati pengembangan ekonomi dilingkungan pesantren. Pertumbuhan ekonomi modern bukanlah merupakan semata-mata suatu masalah meningkatkan faktor-faktor produksi dalam suatu masyarakat, melainkan menyangkut perubahan-perubahan yang sangat besar artinya dalam cara pemanfaatan faktor-faktor produksi itu.

Mencari Format Pesantren Model

Zamakhsari Dhofir dalam bukunya *Tradisi Pesantren*, maka dalam rangka usaha menghasilkan ulama, santri perlu dididik sedemikian rupa dalam lingkungan yang disebut pesantren. Pesantren adalah sistem pendidikan Islam tradisional yang bertumpu pada keberadaan lima elemen pendukung utama, yaitu adanya masjid, pondok, pengajaran kitab-kitab klasik, kyai dan santri.(Dhofir:1996:44). Kesemuanya unsur pesantren membentuk satu pola kehidupan yang menyatu, dan bahkan dalam beberapa hal memiliki

ketahanan tersendiri dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Fungsi *agent of development* (agen perubahan), pesantren dalam hal menangani pembinaan langsung perkembangan prikehidupan masyarakat akan nampak dalam kehidupan sosial di sekitarnya. Fenomena ini nampak sekali khususnya dalam masyarakat desa di mana suatu pesantren berada. Kalau dicermati, sebenarnya pesantren tidak hanya menjadi agen perubahan dalam lingkup masyarakat sekitar saja, tetapi ke berbagai wilayah sesuai dengan para santri dari pesantren itu berasal. Biasanya alumni santri banyak yang kemudian mendirikan pesantren lagi di daerah masing-masing. Maka secara tidak langsung pesantren memainkan misi yang penting yaitu membangun dan meningkatkan kesadaran moral dalam masyarakat luas, sekalipun dengan cara sendiri-sendiri (atau tidak terkoordinasi).

Gus Dur yang dilahirkan dari dunia pesantren pernah menyimpulkan masalah-masalah yang terpenting yang harus

dipecahkan oleh pesantren bila mereka ingin mempertahankan dan membangun peranan mereka dalam perkembangan Indonesia selanjutnya, persoalan-persoalan pokok itu adalah:

1. Bagaimana pesantren menyesuaikan dirinya dengan kenyataan bahwa sistem sekolah modern tak terhindarkan dalam jangka panjang, dengan implikasi-implikasi besar bagi pesantren sendiri (hubungan antara kyai dengan santri mengembangkan suatu sistem nilai yang baru dalam lingkungannya sendiri)
2. bagaimana pesantren berusaha merencanakan pembiayaan kegiatan-kegiatannya secara mandiri, dalam bidang pendidikan maupun pelayanan sosial. Dalam jangka panjang ke depan perlu memusatkan perhatian kepada pola pembiayaan sendiri.
3. bagaimana pesantren menemukan cara pemecahan dilema besar kehidupannya: walaupun kyai tidak tergantung pada bantuan pemerintah, pesantren masih lebih melayani golongan orang yang mempunyai

daripada orang yang tidak mempunyai, akibatnya tergantung kepada bantuan-bantuan keuangan dari lapisan atas masyarakat pedesaan.

4. bagaimana pesantren memahami implikasi struktural dari peran serta rakyat dalam pengembangan masyarakat dan bagaimana pesantren menanggapi peranannya dalam proses tersebut.

Gordon (1988) menjelaskan pula aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, dengan penulis sesuaikan dengan konteks dunia pesantren, yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), Nilai (*value*), Sikap (*attitude*), dan Minat (*interest*). (Mulyasa: 2003:38-39).

Menurut Pranarka, konsep pemberdayaan (*empowerment*) didasarkan pada ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri. Berdasarkan studi kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan

kepada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya; *Kedua*, adalah proses yang menekankan usaha stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog.(Pranaka:1996:56-57).

Penjelasan ini mengungkapkan dua kata kunci dalam pemberdayaan, yaitu pemberian kewenangan atau kekuasaan dan usaha penyadaran (*coentisation*). Pemberdayaan pesantren, dengan demikian dapat diartikan pemberian kewenangan atau kesempatan pada pesantren untuk lebih mengembangkan diri dalam mentransformasikan nilai-nilai dalam berkehidupan masyarakat, demikian juga usaha penyadaran bahwa pesantren di era keterbukaan dan reformasi diri harus lebih mengembangkan perannya dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih baik menuju masyarakat yang idealkan agama *baladun thoyyibatun wa rabbun ghofura*.

Ke depan, sesuai dengan tesis penulis pada awal tulisan ini, usaha diversifikasi pesantren dalam masalah keahlian santri di bidang keilmuan dan atau ketrampilan praktis mutlak perlu dilakukan. Usaha ini utamanya perlu di sadari oleh kalangan pengelola pesantren dan juga bagi pemerintah. Karena dari kebutuhan itu dapat dilakukan berbagai komunikasi dan dialog yang produktif antara kedua belah pihak. Khusus berkaitan dengan studi kasus terhadap Pesantren yang ada di Indonesia, nampak bahwa hampir sebagian pesantren merupakan dan sama-sama pesantren yang menyadari pentingnya ketrampilan di bidang ekonomi perlu dilakukan sebagai satu bentuk materi pembelajaran untuk di lingkungan pesantren. Sekalipun kedua-duanya sama baru dalam awal dalam kegiatan berusaha, kedua pesantren menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun tradisi itu. Satu kesadaran yang perlu juga dikembangkan pada pesantren lainnya.

Secara paradigmatis pengembangan pesantren di

Indonesia telah menerapkan konsep pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Pesantren tidak lagi hanya dipahami sebagai lembaga pencetak calon ulama saja, tetapi sudah dianggap sebagai satu bagian integral dari masyarakat yang perlu terlibat aktif dalam proses perubahan sosial, tentu saja dengan kacamata pesantren.

Dari sisi pembelajaran terhadap santri, sekalipun dalam usaha ekonomi masih dapat dikatakan belum berhasil, namun dari gagasannya mengarah pada konsep santri yang mendekati paripurna. Artinya pesantren menargetkan output santri selain mempunyai kepribadian yang baik, pesantren juga menargetkan santri menguasai ilmu-ilmu alat berbahasa untuk kemampuan pembacaan kitab kuning, di tambah lagi santri di arahkan mempunyai ketrampilan di bidang usaha. Atau kalau dikategorikan masuk dalam pesantren tipe A.

Dalam bidang usaha ekonomi dapat dikatakan telah menunjukkan berhasil, walaupun ke depan perlu juga untuk dicermati tingkat

keberhasilannya, namun paling tidak terbukti pesantren ini telah mampu membiayai operasional pesantren dari unit usaha ekonominya. Dari segi target output santri, Pesantren Salafi tidak memasang target terlalu tinggi, yang diutamakan lebih pada santri dengan kemampuan penguasaan ilmu agama dasar, ketrampilan praktis dalam urusan agama dan profesional di bidang usaha, maka peneliti mengkatagorikan pesantren ini bertipe C.

Dari sisi motivasi pesantren melakukan kegiatan ekonomi, pada Pesantren Modern lebih banyak termotivasi oleh himbuan dan dorongan pemerintah, khususnya Departemen Koperasi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sedangkan bagi Pesantren Salafiyah, pengembangan pesantren di bidang yang bersentuhan dengan dunia ekonomi lebih karena untuk membangun bentuk pesantren alternatif. Dampak dari motivasi ini berdampak pada tingkat keberhasilan masing-masing. Pesantren Modern pernah berhasil, namun kemudian agak mengalami penurunan. Sedangkan bagi Pesantren Salafiyah,

sejauh ini menunjukkan gambaran menarik sekalipun dari pengamatan penulis masih terkesan naiknya pelan.

Dari sisi tingkat kebutuhan bantuan yang diharapkan dari pemerintah, kedua pesantren sama-sama membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, paling tidak *political will* pemerintah yang kuat dalam

memberi peluang berusaha bagi kalangan pesantren. Untuk Pesantren Modern, mereka masih membutuhkan pendampingan dalam pengembangan SDM berkualitas dan tambahan investasi, sedangkan untuk Pesantren Salafiyah, mereka membutuhkan adanya tambahan investasi dan pengembangan pasar bagi produk usaha mereka.

Perbandingan Pengembangan Ekonomi
Di Pesantren Modern dan Pesantren Salafiyah

	Pesantren Modern	Pesantren Salafiyah
Output Santri	Kepribadian solih, penguasaan kitab dan mempunyai wawasan ketrampilan praktis berusaha (tipe A)	Kepribadian solih, memiliki kemampuan dalam pelayanan keagamaan umum dan utamanya profesional dlm kegiatan usaha (tipe C)
Posisi kegiatan ekonomi dalam konsep pembelajaran	Komplementer	Pilihan profesional
Alasan Pengembangan kegiatan Ekonomi	Himbauan Pemerintah	Usaha pengembangan pesantren alternatif
Kesiapan konsep pengembangan	Masih berproses	Konsep telah matang sebelum dijalankan
Unit Usaha ekonomi	Koperasi simpan pinjam dan perdagangan	Pertanian/perkebunan dan memfasilitasi potensi pariwisata
Tingkat Keberhasilan	Pasang surut (Belum sepenuhnya berhasil)	Menunjukkan tanda-tanda keberhasilan
Kebutuhan Bantuan yang diperlukan	Pendampingan manajemen dan investasi	Investasi dan pengembangan pasar

Kesimpulan

Pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat serta akan menjadi agent bagi pemberdayaan santrinya, maka setidaknya ada empat macam kemungkinan pola usaha pemberdayaan ekonomi yaitu *pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kiyai, *kedua*, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren, *ketiga*, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren, dan *keempat*, usaha ekonomi bagi para alumni santri.

Pesantren agent perubahan sosial ada beberapa paradigma yang harus ada pada pesantren tersebut, yaitu *Pertama*, paradigma kapitalistik, pandangan ini kalau dicari sumber ajarannya berasal dari pandangan ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith, *kedua*, paradigma kritis, sebagaimana diilhami analisis marxisme dan *ketiga*, paradigma posmodernisme adalah berbagai teori

yang tergolong teori kritis yang tidak bisa atau tidak bisa dimasukkan dalam katehori kapitalistik dan paradigma kritis.

Beberapa komponen yang harus dipertahankan jika ingin membuat pesantren model yang berbasis pemberdayaan ekonomi, yaitu *pertama*, pesantren harus menyesuaikan dirinya dengan kenyataan bahwa sistem sekolah modern (hubungan antara kyai dengan santri mengembangkan suatu sistem nilai yang baru dalam lingkungannya sendiri), *kedua*, pesantren berusaha merencanakan pembiayaan kegiatan-kegiatannya secara mandiri, dalam bidang pendidikan maupun pelayanan sosial, *ketiga*, pesantren menemukan cara pemecahan dilema besar kehidupannya: walaupun kyai tidak tergantung pada bantuan pemerintah, pesantren masih lebih melayani golongan orang yang mempunyai daripada orang yang tidak mempunyai, akibatnya tergantung kepada bantuan-bantuan keuangan dari lapisan atas masyarakat pedesaan, *keempat*, pesantren memahami

implikasi struktural dari peran serta rakyat dalam pengembangan masyarakat dan bagaimana pesantren menanggapi peranannya dalam proses tersebut, *kelima*, pesantren merencanakan untuk membina sifat-sifat khas budaya maupun kedudukan sosio kulturalnya.

Daftar Pustaka

- Adi Sasono, Pengantar dalam *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Ali Yafie, "Pengembangan Iptek dengan Pola Pendidikan Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat Ini)*, (Jakarta: Yayasan Islam al Hamidiyah dan Yayasan Saifudin Zuhri, 1998),
- Aqib Suminto, "Kaderisasi Ulama di Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat Ini)*, (Jakarta: Yayasan Islam al Hamidiyah dan Yayasan Saifudin Zuhri, 1998),
- Asep Suryana "Menolak Instrumentasi Negara: Ruang Gerak Pesantren dalam Otonomi Daerah" dalam *Antropologi Indonesia* 65, 2001, hlm. 105.
- Azyumardi Azra, "Dilema Pesantren Menghadapi Globalisasi" dalam *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat Ini)*, (Jakarta: Yayasan Islam al Hamidiyah dan Yayasan Saifudin Zuhri, 1998),
- _____, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Good governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)* (Jakarta: tp., 2001),
- Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Horowitz, Irving Louis, "Mencari Suatu Ideal Pembangunan: Model dan Implikasi-implikasi utopisnya" dalam *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1985)
- Ismulyadi dkk., *Otonomi Daerah, Demokrasi dan Civi Society*, (Yogyakarta: Media Grafika, 2000)
- Kristiadi Pudjosukanto, 'Kebijaksanaan Alokasi Pembiayaan Daerah dan Otonomi Daerah' dalam *Birokrasi dan Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).
- Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 198-199. *lihat* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Pendidikan di Indonesia*,

Mansour Fakih, *Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist, 2001)

Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996),

Richard T. Gill, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994).

Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan dalam Sejarah*, (Jakarta, LP3ES, 1996)

Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, tt).

Ziemek Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986)